Pranatan Anyar

KR-Antara/HO/Setpres-Muchlis Jr

***VAKSIN KEDUA:** Presiden Joko Widodo disuntik dosis kedua vaksin Covid-19 produksi Sinovac oleh vaksinator Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof Abdul Mutalib di Halaman Tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/1). Penyuntikan dosis kedua tersebut sebagai lanjutan vaksinasi pertama, 13 Januari 2021 lalu.*

LANGKAH KHUSUS KENDALIKAN COVID-19

Karantina Wilayah Terbatas Sampai RT-RW

JAKARTA (KR) - Kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah menembus angka di atas 1 juta kasus. Pemerintah pun menyiapkan langkah khusus untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Perkembangan kasus kita evaluasi dan tentu saja ini memerlukan langkah khusus yang berbeda dari yang selama ini telah dilakukan," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Jakarta, Rabu (27/1).

Muhadjir lantas mengungkap arahan Presiden Joko Widodo agar jajaran menteri membuat strategi dan pendekatan berbeda, agar penanganan Covid-19 lebih baik. Salah satu langkah khusus yang diminta Presiden dalam penanganan Covid-19 itu adalah karantina wilayah terbatas sampai tingkat mikro di lingkup RT dan RW.

"Terutama level hulu, langkah untuk melakukan karantina terbatas, kemudian *tracing, tracking, testing*, dan tentu saja protokol kesehatan 3M dan pengobatan pada mereka yang berstatus sebagai penyandang Covid-19," ungkap Muhadjir yang juga Wakil Ketua III Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Karantina terbatas rencananya dilakukan untuk mendalami kasus yang ada di suatu wilayah dan melakukan pemisahan masyarakat dengan kasus positif, dengan dilakukan isolasi mandiri atau isolasi kolektif. Namun teknis karantina terbatas ini, kata Muhadjir, masih diatur.

Sementara itu Presiden Joko Widodo, Rabu pagi kemarin mendapat suntikan vaksin Covid-19 produksi Sinovac dosis kedua oleh vaksinator Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof Abdul Mutalib di Halaman Tengah Istana Merdeka, Jakarta. Presiden juga mengaku tak merasakan apa-apa seperti saat vaksinasi perdana. "Sama seperti yang dilakukan dua minggu lalu, tidak terasa dan setelah 2 jam hanya pegal-pegal dan sekarang sama-sama aktivitas ke mana-mana," ujarnya. **(Ati/Sim)-d**

DAMPAK KEBIJAKAN PTKM

Baru Terasa 14 Hari Kemudian

BANTUL (KR) - Dampak dari kebijakan Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) 11-25 Januari 2021 baru diketahui 14 hari kemudian. Karena itu, menurut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantul dr Sri Wahyu Joko Santosa, kenaikan kasus konfirmasi positif Covid-19 dua pekan terakhir bukan cerminan dari dampak PTKM Tahap I. Tetapi hal itu merupakan efek dari libur Natal dan tahun baru sebelum pemberlakuan PTKM.

"Dampak PTKM itu baru bisa terlihat sekitar 14 hari setelah pelaksanaan," ujar Sri Wahyu Joko Santosa, Rabu (27/1).

Meski demikian, kata Wahyu Joko Santosa, dampak PTKM Tahap I sudah dirasakan penurunannya kendati tidak signifikan. "Pernah turun di angka 800 pasien positif yang isolasi, meski tidak lama kembali di angka 1.000," ujarnya.

Sementara itu Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Bantul terus mengetatkan prokes serta membangkitkan kesadaran masyarakat pentingnya prokes. FPRB Sumberagung juga mendampingi warga yang menggelar hajatan.

Staf Pemerintahan Kalurahan Sumberagung Ibnu Kanan didampingi Anggota Babinsa Sumberagung dari Koramil 09 Jetis Serka Agus Haryono menjelaskan, selain penyemprotan disinfektan, FPRB, Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga melaksanakan strerilisasi udara dengan sistem ozon. **(Roy)-d**

WAGUB DIY, PEJABAT DAN SEJUMLAH TOKOH

Hari Ini Kembali Divaksin Covid-19

YOGYA (KR) - Vaksinasi Covid-19 kedua untuk sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat DIY akan dilakukan di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (28/1) hari ini. Vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan menyuntikkan dua dosis berjarak 14 hari, sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.

"Semua pejabat dan tokoh masyarakat penerima vaksin Covid-19 perdana pada 14 Januari 2021 lalu dalam keadaan sehat, sehingga siap menerima vaksinasi kedua setelah 14 hari. Pembentukan antibodi atau kekebalan diharapkan dapat mulai terbentuk dua minggu setelah pemberian vaksinasi kedua," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembajun Setyaningastutie, Rabu (27/1).

Pembajun menuturkan, selain dirinya, penerima vaksin kedua lainnya yakni Wakil Gubernur DIY Paku Alam X beserta istri, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, Kapolda DIY, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) DIY, perwakilan Korem 072/Pamungkas, Direktur RSUP Dr Sardjito, pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), tokoh agama dari PWNU, PW Muhammadiyah, Persatuan Hindu Dharma, Permabudhi dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) DIY.

"Vaksinasi ini merupakan salah satu upaya kita menekan penyebaran Covid-19 di DIY. Tidak hanya bermanfaat untuk melindungi diri sendiri tetapi juga untuk melindungi masyarakat. Semoga minimal 70 persen masyarakat dapat menerima vaksinasi, sehingga terbentuk kekebalan masyarakat atau *herd immunity*," jelasnya.

Vaksinasi di DIY dilaksanakan dalam empat tahap. Tahap I untuk sumber daya manusia bidang kesehatan (SDMK) atau tenaga kesehatan (nakes), Tahap II untuk pelayan publik, Tahap III untuk masyarakat rentan, dan Tahap IV untuk pelaku ekonomi esensial dan masyarakat umum.

"Vaksinasi Tahap I untuk tenaga kesehatan, Termin I dilaksanakan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogya, disusul Termin II di Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul. Dari 21.942 nakes di DIY, 97,68 persen telah terdata dan 11.011 orang atau 50,18 persen telah divaksin," terang Pembajun. **(Ira/Ria)-d**

Moeldoko Siap Perjuangkan Nasib Guru Honorer

JAKARTA (KR) - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan siap memperjuangkan nasib guru dan tenaga kependidikan honorer di seluruh Indonesia. Pihaknya siap mencarikan formulanya, sehingga ada perubahan.

"Karena kami juga pernah perjuangkan honorer perawat," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (27/1)

Moeldoko menyatakan siap memfasilitasi perjuangan guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori (GTKNHK 35+) untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K). Delapan perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer dengan usia 35 tahun ke atas atau GTKNHK 35+ saat beraudiensi dengan KSP mempunyai keinginan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).

Moeldoko didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan menyadari, kontribusi dan pengabdian guru dan tenaga kependidikan honorer sangat besar bagi pengembangan sumberdaya manusia. Sayangnya, selama ini masih banyak guru dan tenaga kependidikan honorer yang mendapat upah jauh dari standar. Bahkan, katanya, Presiden Joko Widodo pun prihatin dan sangat memperhatikan masalah ini.

Hal itu pula yang mendorong KSP menerima audiensi GTKNHK 35+ untuk merumuskan masalah dan mencari solusi bersama. "Kami punya semangat yang sama untuk membantu nasib guru dan tenaga kependidikan honorer. Setelah pertemuan ini, GTKNHK bisa berkomunikasi secara intens dengan KSP untuk memperjuangkan apa yang diinginkan," tutur Moeldoko.

Delapan perwakilan GTKNHK 35+ ini hadir dari berbagai provinsi, di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Sulawesi Utara. Sebagian besar dari mereka telah menjadi guru dan tenaga kependidikan honorer lebih dari 15 tahun. Salah satunya Yudha Aremba, yang merupakan Ketua I GTKNHK 35+. Yudha, guru honorer salah satu SD di Jawa Timur sudah memasuki masa pengabdian selama 16 tahun dan hingga kini hanya mendapat upah Rp 700.000 perbulan.

"Sehingga masa muda kami habis untuk mencari kerja sampingan. Ini merupakan bentuk beratnya kami menjalankan kehidupan," cerita Yudha.

Dari pengalaman pengabdiannya itu, Yudha dan para anggota GTKNHK 35+ sempat menggelar rapat koordinasi nasional Februari 2020. Pada Rakornas GTKHNK 35+ itu disepakati dua tuntutan, yakni pengangkatan sebagai ASN melalui keputusan presiden dan penaikkan upah guru dan tenaga kependidikan honorer. **(Ati)-f**

OJK SETUJUI MERGER 3 BANK

Bank Syariah Indonesia Segera Hadir

JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui mergernya 3 bank syariah milik Himbara yakni PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah.

Persetujuan tersebut tertuang dalam surat dengan Nomor : SR-3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk.

OJK juga mengizinkan perubahan nama dengan menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

"OJK mengeluarkan surat tentang pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk. Selain itu OJK juga mengizinkan perubahan nama dengan menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan," kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, di Jakarta, Rabu (27/1).

Dengan keluarnya surat ini, maka selanjutnya Bank Syariah Indonesia akan melakukan pengurusan perubahan anggaran dasar di Kemenkumham dan perubahan/pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. **(Lmg)-f**